

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara agraris, dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di bidang pertanian, baik secara langsung mengelola lahan maupun dalam bidang agribisnis. Bidang pertanian, sampai saat ini masih merupakan andalan bagi perekonomian Indonesia. Data Biro Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 1994 angkatan kerja nasional berjumlah sekitar 82 juta jiwa, sekitar 54% atau 38 juta jiwa adalah tenaga kerja pada usahatani (*onfarm agribusiness*). Bila kegiatan pada agribisnis hulu, agribisnis hilir, dan jasa layanan pendukung agribisnis diperhitungkan, maka sekitar 70% angkatan kerja nasional terlibat dalam sektor agribisnis. Dengan rata-rata anggota keluarga empat orang, maka sekitar 80% dari 200 juta penduduk Indonesia menggantungkan kehidupan ekonominya dalam sektor agribisnis. Mereka adalah keluarga petani, buruh tani, nelayan, peternak, pedagang hasil pertanian dan olahan, para pengusaha kecil-menengah-besar, karyawan/buruh perusahaan agribisnis yang tersebar di seluruh Indonesia (Saragih, 1998).

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional abad ke-21 masih akan tetap berbasis pertanian secara luas. Namun, sejalan dengan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi maka kegiatan jasa-jasa dan bisnis yang berbasis pertanian juga akan semakin meningkat, yaitu kegiatan agribisnis (termasuk agroindustri) akan menjadi salah satu kegiatan unggulan (*a leading sector*) pembangunan ekonomi nasional dalam berbagai aspek yang luas (Saragih, 1998:45).

Indonesia sebagai produsen kakao terbesar ketiga dunia setelah *Cote d'Ivoire* (Pantai Gading) dan Ghana, diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas mutu kakao. Sehingga diperlukan cara untuk mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas kakao Indonesia agar selalu dapat bersaing di pasar dunia. Indonesia memiliki luas areal tanaman kakao yang meningkat dari tahun ke tahun. Data Badan Pusat Statistik (2014:239) menunjukkan pada tahun 2011 luas areal tanaman kakao seluas 1.732,6 ribu Ha,

pada tahun 2012 menjadi 1774,5 ribu Ha dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 1852,9 ribu Ha (Lampiran 1).

Badan Pusat Statistik Kota Padang (2004:241) menunjukkan data produksi kakao mengalami peningkatan selama tahun 2011-2013 dengan produksi tahun 2011 sebesar 712,2 ribu ton, tahun 2012 sebesar 740,5 ribu ton, dan tahun 2013 sebesar 777,5 ribu ton (Lampiran 2). Namun disisi lain masih ada beberapa daerah di Indonesia yang mengalami penurunan produksi kakao bahkan tanaman kakao yang mereka miliki tidak berproduksi. Hal ini antara lain disebabkan oleh umur tanaman yang sudah menua, dibarengi oleh menuanya umur produsen/petani kakao, serangan hama dan penyakit, menurunnya tingkat kesuburan tanah, kurang tertariknya generasi penerus untuk menjadi petani kakao, dan persaingan penggunaan lahan untuk budidaya kakao dan komoditas lainnya.

Pemerintah tentunya mengambil peran dalam upaya mempertahankan bahkan meningkatkan produksi kakao di Indonesia. Beberapa Program Pembangunan Kementerian Pertanian Tahun 2014 terkait pengembangan komoditi kakao di Indonesia diantaranya adalah: (a) peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan, (b) peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran, dan ekspor hasil pertanian, (c) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, (d) penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing. Maka, dibutuhkan suatu teknologi inovasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi beberapa daerah di Indonesia yang produksi kakao-nya masih tergolong rendah bahkan tidak produktif (Rencana Kerja Tahunan Kementerian Pertanian, 2014:18-24).

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (2014) juga memiliki program-program untuk pengembangan kakao, diantaranya adalah: (a) Penyebaran informasi teknologi budidaya dan pasca panen, (b) Gerakan sambung pucuk tanaman kakao, (c) Pengembangan nagari model kakao, (d) Pengembangan tanaman perkebunan pada lokasi TMMN & Bakti Sosial (PKK, BKKBN, KKN), (e) Gerakan pemangkasan dan pemupukan kakao (bantuan gunting pangkas kakao), (f) Pengembangan skala ekonomi tanaman kakao, (g) Pelatihan teknologi terapan PHT kakao, (h) Pengawasan perlindungan perkebunan dan pembinaan brigade proteksi, (i) Gerakan pengendalian hama utama perkebunan (Lampiran 3).

Inti dari setiap upaya pembangunan yang disampaikan melalui kegiatan penyuluhan, pada dasarnya ditujukan untuk tercapainya perubahan-perubahan perilaku masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu hidup yang mencakup banyak aspek, baik: ekonomi, sosial, budaya, ideologi, politik maupun pertahanan dan keamanan. Karena itu, pesan-pesan pembangunan yang disuluhkan haruslah mampu mendorong atau mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang memiliki sifat “pembaharuan” yang biasa disebut dengan istilah “*inovativensess*” (Mardikanto, 2009:91).

Rogers (1995:11) inovasi merupakan suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau lembaga lainnya. Hal ini dianggap penting bagi individu yang bersangkutan, apakah ide tersebut secara objektif baru bila diukur dengan selang waktu sejak penemuan pertama. Jika ide tampaknya baru untuk individu, itu adalah sebuah inovasi. Proses keputusan inovasi terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut: (a) Pengetahuan (*knowlegde*): tahap pengetahuan terjadi ketika seseorang (ataupun kelompok) menerangkan ada sebuah inovasi dan apa fungsi dari pengetahuan tersebut. (b) Persuasi (*persuasion*): membentuk perubahan sikap. (c) Keputusan (*decision*): keputusan untuk menolak atau mengadopsi inovasi. (d) Implementasi (*implementation*): pelaksanaan inovasi sampai penggunaan. (e) Konfirmasi (*confirmation*): penegasan/pengesahan untuk menerima atau menolak, namun seringkali tidak menjadi batasan akhir dalam proses keputusan inovasi (Rogers, 1995:162).

Penyuluh tentu memiliki peran yang penting sebagai mata rantai yang menghubungkan antara penelitian dan petani. Penyuluh merupakan agen komunikasi untuk menyampaikan informasi mengenai suatu inovasi. Inovasi bisa saja berkembang baik dari penelitian dan juga dari petani. Inovasi merupakan suatu gagasan, metode atau objek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru, tetapi tidak selalu merupakan hasil dari penelitian mutakhir. Menurut Ban (1996:122-123) wawancara dengan pengguna utama membentuk dasar studi adopsi inovasi. Pertanyaan-pertanyaan yang ditelaah adalah sebagai berikut: (a) Jalur pengambilan keputusan apa saja yang dipertimbangkan oleh seseorang untuk menolak atau mengadopsi suatu inovasi ? Sumber-sumber inovasi apa saja yang penting ? (b) Apa perbedaan antara seseorang yang mengadopsi inovasi dengan

cepat atau lambat ? (c) Bagaimana ciri-ciri inovasi mempengaruhi tingkat adopsi ? (d) Bagaimana pengguna inovasi berkomunikasi antar mereka mengenai inovasi tersebut ? Siapa yang memainkan peran sebagai pemimpin di dalam proses komunikasi tersebut ? (e) Bagaimana suatu inovasi menyebar ke masyarakat dari waktu ke waktu ? (Ban, 1996:123).

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa kegiatan yang tujuannya untuk memacu pertumbuhan tanaman kakao dan meningkatkan produksi kakao. Diantara kegiatan tersebut adalah Pelatihan SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) Kakao yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Menurut Ikatan Pemandu Lapang Perkebunan Indonesia (2005:9) SLPHT merupakan salah satu metoda penyuluhan atau bentuk pendidikan non formal berdasarkan pendekatan andragogi yang ditujukan untuk membantu proses pembelajaran orang dewasa. Sistem agribisnis berbasis kakao ini terdiri dari sub sistem hulu, *on farm*, hilir (pasca panen dan pengolahan), sub pasar dan faktor penunjang lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan gairah masyarakat melakukan usahatani kakao secara serius, sehingga bisa menjadi sumber pencarian utama dan pendapatan petani secara berkelanjutan yang tujuan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan keluarga petani.

Kegiatan SLPHT Kakao diadakan untuk memberikan pengetahuan kepada petani kakao tentang budidaya kakao, pengendalian hama, pemangkasan, pemupukan, sambung pucuk dan samping dan teknis lainnya (Ikatan Pemandu Lapang Perkebunan Indonesia, 2005:9). Dengan diberikan pengetahuan tersebut petani dapat merawat tanaman kakao sesuai dengan kebutuhannya sehingga nantinya dapat meningkatkan produksi kakao serta memberikan kesejahteraan kepada petani. Tahun 2014 telah dilaksanakan SLPHT di Provinsi Sumatera Barat yang ada pada 4 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Padang dan Kota Pariaman. Sekolah Lapang tersebut berlangsung selama 7 kali pertemuan pada masing-masing Kabupaten/Kota. Dimana peserta sekolah lapang berjumlah 25 orang pada masing-masing Kabupaten/Kota. Adapun materi pembelajaran yang diberikan per-minggu adalah: (a) Ekosistem kakao dan analisa agroekosistem, (b) sanitasi dan pemangkasan, (c) pemupukan, (d) sambung pucuk

dan sambung samping tanaman kakao, (e) membedakan hama dan penyakit pada tanaman kakao, (f) membuat pupuk organik dan pestisida nabati, (g) *fill day* (lomba antar kelompok) + *ballot box* akhir. (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, 2014).

B. Rumusan Masalah

Data Badan Pusat Statistik Kota Padang (2014:241) menunjukkan angka produksi tanaman kakao di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2011-2012. Pada tahun 2011 total produksi kakao di Indonesia sebanyak 712,2 ribu ton meningkat menjadi 740,5 ribu ton (Lampiran 2). Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Barat memiliki area tanaman kakao terluas nomor urut 5 (lima) se-Indonesia pada tahun 2012, setelah provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Untuk pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki luas lahan terluas dengan luas area kakao 143,1 ribu Ha pada tahun 2013 (Lampiran 1). Berdasarkan statistik Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (2014), produktifitas kakao di Sumatera Barat masih tergolong rendah yaitu dibawah 900 kg/Ha/tahun, masih jauh dari potensi produksi kakao yang mestinya mencapai 2-2,5 ton/Ha/tahun. Penyebabnya adalah kurangnya pemeliharaan dalam membudidayakan tanaman kakao.

Budidaya tanaman kakao di Kecamatan Bungus Teluk Kabung sudah dilakukan sejak ± 10 tahun yang lalu, namun kegiatan budidaya kakao tersebut tidak menggunakan teknik yang tepat. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang (2014) menunjukkan produksi tanaman kakao di Kecamatan Bungus Teluk Kabung 21,000 kg/triwulan II tahun 2014 (Lampiran 4). Hal tersebut dikarenakan masih banyak petani kakao yang menanam kakao dengan jarak tanam yang rapat yaitu dengan jarak tanam 1x1 meter, 2x1 meter, dan sebagainya. Menurut Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (2014:7) jarak tanaman kakao yang baik untuk berproduksi adalah sekitar 3x3 meter atau 4x2 meter. Selain itu, pada umumnya petani kakao tidak melakukan kegiatan pemeliharaan kakao secara rutin seperti pemangkasan yang bertujuan untuk mengendalikan hama penyakit pada tanaman kakao dan menanam

pohon pelindung yang bertujuan untuk mengoptimalkan pencahayaan tanaman kakao dan sebagai naungan tanaman kakao.

Program dan kegiatan pengembangan tanaman kakao di Kelurahan Bungus Timur Kota Padang menjadi perhatian yang serius oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, seperti kegiatan sekarang berupa Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kakao ini. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan dan pembangunan tanaman kakao, memberdayakan masyarakat khususnya dalam membudayakan kakao sehingga akan memberikan kemajuan dalam peningkatan produksi serta memberikan kesejahteraan kepada petani.

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dilakukan selama bulan Maret-Mei 2014 yang dilaksanakan setiap 1 kali seminggu. Sekolah lapang dilakukan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung karena di lokasi tersebut banyak petani yang punya tanaman kakao namun produksinya sedikit. Selain itu ada pula petani yang datang secara langsung ke Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat agar diadakan sekolah lapang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung guna meningkatkan produksi kakao dan menyosialisasikan inovasi teknik sambung pucuk dan sambung samping. Petani kakao yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung telah melihat bukti nyata peningkatan produksi kakao yang ada di nagari model kakao Payakumbuh. Sehingga dilaksanakanlah Program SLPHT Kakao di Kecamatan Bungus Teluk Kabung kepada beberapa petani yang sudah terdaftar dalam kelompok tani.

Pada umumnya petani kakao di Kecamatan Bungus Teluk Kabung tidak melakukan kegiatan pemeliharaan kakao secara rutin seperti pemangkasan yang bertujuan untuk mengendalikan hama penyakit pada tanaman kakao dan menanam pohon pelindung yang bertujuan untuk mengoptimalkan pencahayaan tanaman kakao dan sebagai naungan tanaman kakao. Sambung pucuk dan sambung samping merupakan sebuah inovasi “hal yang dianggap baru” dalam teknik budidaya kakao karena belum pernah dilakukan oleh petani kakao di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Sambung pucuk digunakan pada bibit tanaman kakao atau dalam kondisi bibit tanaman kakao di *polibag*. Teknik sambung pucuk dengan

cara memotong batang atas tanaman kakao dan menggabungkannya dengan batang bawah tanaman kakao yang lainnya. Sedangkan sambung samping adalah salah satu teknik penyambungan yang menggunakan kayu mata tunas dari klon terpilih yang dipotong dan ditempel pada tanaman yang dewasa. Peremajaan kakao menggunakan bahan tanaman yang baik melalui sambung samping merupakan metode yang baik disebabkan persentase keberhasilan tinggi, hasil cepat dan ongkos murah.

Rogers (2003:170) proses keputusan inovasi adalah sebuah proses berkesinambungan yang dilalui individu (organisasi) melalui tahap pengetahuan inovasi, membentuk perubahan sikap ke arah inovasi, memutuskan mengadopsi atau menolak inovasi, mengimplementasikan ide baru, dan konfirmasi dari keputusan yang telah diambil. Tentunya proses keputusan inovasi memiliki tahapan, mulai dari: tahap pengetahuan (*knowlegde*), tahap persuasi (*persuasion*), tahap keputusan (*decision*) apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi teknik sambung pucuk dan sambung samping, jika mengadopsi inovasi maka dilanjutkan pada tahap implementasi (*implementation*), dan tahap konfirmasi (*confirmation*). Berdasarkan uraian di atas maka muncul sejumlah pertanyaan dari peneliti yaitu :

1. Bagaimana proses keputusan inovasi teknik sambung pucuk dan sambung samping pada petani yang mengikuti SLPHT Kakao di Kecamatan Bungus Teluk Kabung?
2. Apa saja faktor-faktor yang berhubungan terhadap tingkat proses keputusan inovasi teknik sambung pucuk dan sambung samping di Kecamatan Bungus Teluk Kabung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengukur tingkat proses keputusan inovasi teknik sambung pucuk dan sambung samping tanaman kakao pada petani peserta SLPHT Kakao di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan terhadap tingkat proses keputusan inovasi teknik sambung pucuk dan sambung samping tanaman kakao di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi petani kakao di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, yaitu sebagai masukan dan informasi untuk mengetahui sisi positif dan negatif sebelum mengadopsi inovasi program pemerintah yang diusulkan oleh penyuluh.
2. Bagi mahasiswa, sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses keputusan inovasi teknik sambung pucuk dan sambung samping tanaman kakao .

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka hipotesis penelitian yaitu:

1. Dengan adanya SLPHT maka tingkat proses keputusan inovasi teknik sambung pucuk dan sambung samping tanaman kakao di Kecamatan Bungus Teluk Kabung berada pada kategori tinggi.
2. Karakteristik petani dan karakteristik usahatani berhubungan terhadap tingkat proses keputusan inovasi teknik sambung pucuk dan sambung samping tanaman kakao di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

